



PEMERINTAH  
KOTA SURAKARTA

# RENCANA KERJA 2025

SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I	
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II	
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 .....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Renja Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2024.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Surakarta .....	9
2.3. Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surakarta 20	
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	23
BAB III	
TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH .....	26
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.....	26
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Surakarta .....	29
BAB IV	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....	32
BAB V	
PENUTUP .....	59

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan .....	5
Tabel 2. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat .....	6
Tabel 2. 3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah .....	6
Tabel 2. 4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Surakarta .....	10
Tabel 2. 5 Realisasi Usulan Musrenbangcam & Diskusi Kelompok Terbatas (DKT) Tahun 2023 Pada APBD Tahun Anggaran 2024.....	23
Tabel 3. 3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kota Surakarta .....	29
Tabel 3. 4 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 .....	30
Tabel 3. 5 Kegiatan Prioritas Sekretariat Daerah Tahun 2025 .....	31
Tabel 4. 1 Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2025.....	32
Tabel 4. 2 Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2025.....	35

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta sumber dana yang dibutuhkan.

Hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai turunan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026. Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Surakarta tahun 2021 – 2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program yang disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta. Renstra Sekretariat Daerah Kota Surakarta ini selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahunan dengan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Surakarta.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kota Surakarta Tahun 2025, Renstra Perangkat Daerah, RKP K/L, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode

sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025.

Rancangan Renja-PD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Gambaran program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja maka suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 disusun berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025.

6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
9. Peraturan Walikota Surakarta Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

### 1.3. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Surakarta tahun 2025 adalah:

- a. Mensinergikan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Surakarta tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 – 2026.
- b. Evaluasi terhadap program dan kegiatan tahun sebelumnya dan menjadi pijakan untuk perencanaan kegiatan tahun depan terhadap program-program kegiatan yang belum terlaksana di tahun berjalan.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kota Surakarta tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Tujuan dan Sistematika Penulisan

**BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH**

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Surakarta, Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi tentang telaah terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi Jawa Tengah, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisi tentang rencana kerja program dan kegiatan perangkat daerah di tahun 2025

**BAB V : PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Renja Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaan kinerja perangkat daerah. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi misi yang tertuang dalam resntra Tahun 2021-2026, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Hasil evaluasi realisasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023 didasarkan atas capaian 2 aspek. Aspek pertama adalah realisasi keuangan dan aspek kedua adalah realisasi kinerja atau fisik. Adapun Evaluasi atas Program/Kegiatan yang tertuang dalam Renja dan Renstra Sekretariat Daerah yaitu :

##### A. Program Perekonomian dan Pembangunan

Meliputi kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, dan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

**Tabel 2. 1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TH 2022	TAHUN 2023	
			REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Level MRI	level	3	2,75	3,106

B. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Meliputi kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah, Administrasi Tata Pemerintahan, Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

**Tabel 2. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TH 2022	TAHUN 2023	
			REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Nilai LPPD	Nilai	3,4035	3,5	3,57
2	Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya	%	90,8	96	88,06

C. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Meliputi kegiatan Penataan Organisasi, Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

**Tabel 2. 3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TH 2022	TAHUN 2023	
			REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	27,31	26,90	27,31
2	Persentase Maturitas PD dengan level 3	%	100	53	100

Dari hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023, dalam mencapai target yang telah ditetapkan, masing-masing indikator memiliki faktor pendorong dan faktor penghambat yang berbeda-beda, antara lain:

- a. pengumpulan dan pengisian data mengalami peralihan dari tahun sebelumnya yang semula hanya manual utk tahun ini melalui aplikasi sanja simbak dan manual
- b. pergantian pegawai yang menangani terkait maturitas kelembagaan di beberapa OPD sehingga masih belum terlalu paham tentang penilaian maturitas kelembagaan
- c. kendala dalam beberapa variable yang terkait dengan diklat dan manajemen risiko pelaksanaan tugas perangkat daerah
- d. beberapa OPD masih kesulitan dalam melengkapi data dukung yang diperlukan karena berbagai faktor.
- e. belum seluruh OPD mengidentifikasi risiko fraud dan beberapa OPD belum melakukan pemantauan atas RTP risiko kecurangan (fraud) dan masih terdapat beberapa tagging risiko fraud pada aplikasi SARKEMIS yang kurang tepat.
- f. belum seluruh pimpinan OPD ikut andil dalam peningkatan kualitas substansi manajemen risiko melalui kegiatan Focus Group Discussion dalam melakukan Root Cause Analysis.
- g. akan dilakukan penambahan fitur dalam SARKEMIS dan Melibatkan unsur pejabat Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Risiko dan menekankan kepada Prangkat Daerah dalam materi sosialisasi bawa Pejabat dalam suatu Perangkat Daerah adalah Unit Pemilik Risiko sehingga harus ikut andil dalam Identifikasi Risiko, FGD dan penyusunan RTP.
- h. pohon kinerja belum sepenuhnya mengeksplorasi alternatif solusi atas pemecahan masalah yang relevan yang dibutuhkan dalam pencapaian kinerja, sehingga pada sebagian pohon kinerja PD teridentifikasi masih terpaku pada perencanaan yang telah ada.
- i. masih ditemukan indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound) dan cukup untuk menggambarkan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang mendorong tercapainya realisasi program dan kegiatan ini antara lain :

- a. Pendampingan secara intensif kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dengan membagi Tim Verifikator bagi OPD untuk melaksanakan penilaian mandiri

- b. Penyelenggaraan workshop terkait dengan Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah
- c. Koordinasi secara intensif dengan Biro Organisasi Setda Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- d. Pengembangan fitur-fitur dalam aplikasi Sanja Simbak dan melakukan perbaikan terhadap kekurangan maupun kesalahan sistem dalam aplikasi Sanja Simbak.
- e. Pemetaan potensi kerja sama daerah
- f. Pengoptimalan peran Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD)
- g. Pendampingan dalam penyusunan perjanjian kerjasama
- h. Peningkatan kapasitas personil
- i. Sosialisasi dan monev kerjasama daerah
- j. Sosialisasi terkait dengan Manajemen Risiko kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta melalui Daring dan Luring
- k. pendampingan kepada OPD secara intensif dengan membagi Tim Unit Kepatuhan menjadi beberapa PIC
- l. koordinasi secara intensif dengan BPKP Provinsi Jawa Tengah selaku penilai MR
- m. Pengembangan fitur-fitur dalam aplikasi SARKEMIS
- n. Pemetaan potensi kerja sama daerah
- o. Pengoptimalan peran Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD)
- p. Pendampingan dalam penyusunan perjanjian kerjasama
- q. Peningkatan kapasitas personil
- r. Sosialisasi dan monev kerjasama daerah
- s. Asistensi Penyusunan LPPD
- t. dalam penyusunan bukti dukung
- u. Koordinasi antar Tim Penyusun dan Pokja Penyusunan LPPD
- v. Konsultasi dengan Biro Pemerintahan, Kerjasama dan Otda Setda Prov Jateng
- w. Konsultasi pengalaman baik strategi penyusunan maupun teknis penyusunan bukti dukung ke daerah yang berprestasi
- x. Terdapat integrasi sistem antara SIPPD dan ESAKIP untuk perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja
- y. Dilakukan perbaikan penjenjangan kinerja dengan mengidentifikasi *critical success factor (CSF)*

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Surakarta**

Berdasarkan tugas dan fungsi sekretariat daerah, terdapat beberapa indikator yang menunjang kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Surakarta dalam mendukung capaian kinerja Pemerintah Daerah. Berikut ini disampaikan target dan realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kota Surakarta tahun 2021.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 dan RKPD Kota Surakarta Tahun 2025. Berikut adalah Evaluasi Capaian Renja Tahun Lalu 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah tersaji dalam tabel 2.4 berikut ini :

---

**Tabel 2. 4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Surakarta**

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (Pelaksanaan SKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV							
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
(3)	(4)	(5)			(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=8+9+10+11)		(13=6+12)		(14=13/5 x 100% )	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		vol	sat																			
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
SEKRETARIAT DAERAH																						
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																						
Administrasi Tata Pemerintahan																						
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	53	Dokumen	5.506.529.500	17	1.754.700.021	18	21.013.433.648	4.00	0	0	0	0	0	0	0	4	0	21	1.754.700.021	39.62%	31,87%
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	42	Dokumen	2.425.000.000	13	1.262.780.036	14	520.355.600	7.00	0	0	0	0	0	0	0	7	0	20	1.262.780.036	47.62%	52,07%
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
SEKRETARIAT DAERAH																						
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN																						

KESEJAHTERAAN RAKYAT																						
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat																						
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	81	Dokumen	7.326.920.000	53	7.789.257.876	27	3.295.715.475	4.00	549.333.110	0	0	0	0	0	0	4	549.333.110	57	8.338.590.986	70.37%	113,81%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	6	Dokumen	3.600.240.000	7	3.977.934.500	2	2.388.672.000	1.00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	3.977.934.500		110,49%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	6	Dokumen	255.410.000	7	65.014.600	2	66.315.000	1.00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	65.014.600		25,45%
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
SEKRETARIAT DAERAH																						
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																						
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum																						
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1500	Dokumen	1.615.220.784	1345	545.633.440	500	326.810.000	293.00	0	0	0	0	0	0	0	293	0	1638	545.633.440		33,78%
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	60	Kasus	9.397.826.972	25	2.619.020.760	20	1.146.890.000	6.00	0	0	0	0	0	0	0	6	0	31	2.619.020.760	51.67%	27,87%
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1800	Dokumen	3.309.450.973	1302	1.181.812.301	600	585.455.000	293.00	0	0	0	0	0	0	0	293	0	1595	1.181.812.301	88.61%	35,71%

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
SEKRETARIAT DAERAH																						
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																						
Fasilitasi Kerja Sama Daerah																						
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	145	Dokumen	811.570.851	23	859.834.793	46	445.167.900	15.00	0	0	0	0	0	0	0	15	0	38	859.834.793	26.21%	105,95%
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	48	Dokumen	997.382.944	5	528.627.790	16	257.450.000	2.00	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	528.627.790	14.58%	53,00%
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	6	Laporan	481.029.576	2	157.803.633	2	23.035.000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	157.803.633	33.33%	32,81%
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
SEKRETARIAT DAERAH																						
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN																						
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian																						
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	72	Dokumen	513.790.000	45	352.795.750	24	152.955.500	8.00	0	0	0	0	0	0	0	8	0	53	352.795.750	73.61%	68,67%
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6	Laporan	1.482.000.000	38	2.617.497.150	2	34.806.000	1.00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	39	2.617.497.150		176,62%
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	30	Dokumen	958.110.000	28	429.923.610	10	2.021.176.600	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	429.923.610	93.33%	44,87%
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
SEKRETARIAT DAERAH																						
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN																						

Pelaksanaan Administrasi Pembangunan																						
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	6	Dokumen	251.995.783	4	180.160.400	2	55.430.000	1.00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	180.160.400	83.33%	71,49%
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	102	Laporan	1.334.080.000	68	516.616.727	34	329.705.100	5.00	0	0	0	0	0	0	0	5	0	73	516.616.727	71.57%	38,72%
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	Laporan	314.790.000	8	159.852.500	4	69.280.000	1.00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	159.852.500	75%	50,78%
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
SEKRETARIAT DAERAH																						
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN																						
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																						
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12	Dokumen	774.111.633,45	8	306.453.222	4	187.531.000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	306.453.222	66.67%	39,59%
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	9	Dokumen	407.665.259,27	4	190.402.750	3	75.450.000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	190.402.750	44.44%	46,71%
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3978	Orang	1.071.582.698,31	4797	387.484.150	1326	224.405.000	300.00	0	0	0	0	0	0	0	300	0	5097	387.484.150		36,16%
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
SEKRETARIAT DAERAH																						
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN																						
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam																						

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3	Dokumen	9.251.320.000	3	425.142.991	1	274.641.300	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	425.142.991	100%	4,60%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Petaan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	7	Dokumen	284.710.000	7	45.873.000	3	27.079.500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	45.873.000	100%	16,11%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																							
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21	Dokumen	342.860.985,60	14	61.289.000	7	149.816.884	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	17	61.289.000	80,95%	17,88%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	Laporan	99.551.172	6	17.098.750	3	45.006.504	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	9	17.098.750	100%	17,18%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																							

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	504	Orang/bulan	80.956.696.127,62	300	37.882.017.406	168	44.434.215.692	148.00	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0	448	37.882.017.406	88.89%	46,79%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	Laporan	293.591.592	8	99.028.975	4	31.965.320	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	99.028.975	75%	33,73%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																							
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																							
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3	Dokumen	803.327.338,80	2	368.895.190	1	413.911.680	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	368.895.190	66.67%	45,92%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																							
Administrasi Umum Perangkat Daerah																							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	379.022.576,13	4	227.557.089	1	198.137.600	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	227.557.089		60,04%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	3.061.291.522,80	4	969.134.463	1	320.212.940	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	969.134.463		31,66%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	1.395.425.153,57	4	572.721.160	1	484.053.880	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	572.721.160		41,04%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	5.239.420.168,57	4	2.844.112.355	4	1.969.150.260	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	2.844.112.355	41.67%	54,28%

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																						
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	39	Unit	857.814.318,63	9	305.177.970	24	46.678.400	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	305.177.970	23,08%	35,58%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	132	Unit	358.950.551,67	23	638.923.500	84	385.365.600	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	638.923.500	17,42%	178,00%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	203.933.802,44	4	253.487.357	4	62.739.500	1,00	10.000.000	0	0	0	0	0	0	1	10.000.000	5	263.487.357	41,67%	129,20%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	13.402.349.412,81	4	7.035.011.856	4	7.607.598.000	1,00	883.715.252	0	0	0	0	0	0	1	883.715.252	5	7.918.727.108	41,67%	59,08%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Laporan	865.997.056,54	4	349.119.999	4	147.264.700	1,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	349.119.999	0%	40,31%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	21.260.906.962,58	4	9.955.774.600	4	749.059.600	1,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	9.955.774.600	41,67%	46,83%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	360	Unit	3.653.170.303,10	448	1.398.352.300	120	2.812.045.400	112,00	145.337.703	0	0	0	0	0	0	112	145.337.703	560	1.543.690.003		42,26%
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	237	Unit	295.949.583	20	63.552.425	77	106.000.000	5,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0	25	63.552.425	10,55%	21,47%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36	Unit	1.317.618.644,07	10	1.732.707.025	12	1.099.840.000	2,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0	12	1.732.707.025	33,33%	131,50%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	87	Unit	1.317.618.644,07	48	947.060.567	28	918.465.112	25,00	0	0	0	0	0	0	0	25	0	73	947.060.567	83,91%	71,88%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	0	1	9.900.000	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9.900.000	0%	0%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																						
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6	Orang/Bulan	3.180.373.813	2	773.898.884	2	873.419.860	2,00	211.752.621	0	0	0	0	0	0	2	211.752.621	4	985.651.505	66,67%	30,99%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6	Paket	182.050.000	4	873.585.484	2	90.057.400	2,00	87.945.300	0	0	0	0	0	0	2	87.945.300	6	961.530.784	100%	528,17%
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6	Orang	291.280.000	0	0	2	45.000.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																						
Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah																						
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	36	Paket	387.200.000	17	812.880.796	12	430.000.000	3.00	0	0	0	0	0	0	0	3	0	20	812.880.796	55,56%	209,94%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	36	Paket	400.510.000	17	472.616.618	12	360.000.000	3.00	0	0	0	0	0	0	0	3	0	20	472.616.618	55,56%	118,00%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	36	Paket	546.150.000	11,9	1.719.464.126	12	1.683.297.100	3.00	0	0	0	0	0	0	0	3	0	14,9	1.719.464.126	41,39%	314,83%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																						
Penataan Organisasi																						
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	16	Dokumen	8.748.728.698	11	1.404.502.203	3	476.549.340	1.00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	1.404.502.203	75%	16,05%
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	17	Laporan	1.442.285.193	22	567.023.690	3	198.150.820	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	23	567.023.690		39,31%
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	0	Dokumen	1.666.368.275	41	560.252.083	3	241.664.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	42	560.252.083	0%	33,62%
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	24	Dokumen	1.857.705.518	14	1.282.059.890	5	397.673.035	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0	17	1.282.059.890	70,83%	69,01%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	11	Dokumen	1.267.412.966	6	970.246.766	4	396.536.960	2,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	970.246.766	72,73%	76,55%

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																						
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan																						
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	2160	Laporan	3.376.430.639	1608	2.235.765.730	720	895.282.200	180.00	0	0	0	0	0	0	0	180	0	1788	2.235.765.730	82.78%	66,22%
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2160	Laporan	5.184.103.115	1603	2.669.111.080	720	778.192.850	180.00	0	0	0	0	0	0	0	180	0	1783	2.669.111.080	82.55%	51,49%
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2160	Laporan	2.926.000.901	1600	2.885.315.441	720	1.557.685.200	180.00	0	0	0	0	0	0	0	180	0	1780	2.885.315.441	82.41%	98,61%
<b>TOTAL</b>				219.932.832.008		<b>109.312.266.778</b>		<b>103.936.795.460</b>		<b>1.888.083. 986</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.888.083.986</b>		<b>111.200.350.76 4</b>	<b>47.71%</b>	<b>70.97%</b>	

### **2.3. Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surakarta**

Permasalahan pelayanan di Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya perencanaan pengembangan wilayah regional yang mampu mensinkronkan dan mengakomodir kebutuhan serta potensi kabupaten/kota sebagai dasar/pedoman peningkatan kerjasama antar daerah se-SUBOSUKAWONOSRATEN
- b. Belum optimalnya peran kerjasama kelembagaan sosial dan keagamaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan
- c. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terkait pembentukan produk hukum daerah
- d. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kota Surakarta
- e. Belum optimalnya capaian nilai LPPD dikarenakan belum seluruh IKK dapat diimplementasikan oleh Perangkat Daerah pengampu urusan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah. Faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kota Surakarta, antara lain:

- a. Pada indikator nilai LPPD, anggaran dalam aktivitas penyusunan LPPD mengalami penurunan sehubungan dengan kebijakan refocusing anggaran. Meskipun mengalami penurunan anggaran, nilai LPPD dapat diraih dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Metode yang digunakan meliputi asistensi atau pendampingan serta komunikasi yang intens saat proses penyusunan LPPD
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Surakarta semakin ditingkatkan melalui pelayanan terpadu berbasis teknologi informasi (TI). Hal ini merupakan komitmen dalam penataan sistem manajemen melalui website yang mudah diakses dunia usaha dan masyarakat pada umumnya seperti adanya LPSE, SIMONAS, SIMONELA, dan Layanan Live Chat untuk

Penyedia Pengadaan Barang Jasa.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Kota Surakarta adalah :

- a. masih terdapat beberapa komponen data dukung 11 variabel penilaian KOD dari Perangkat Daerah yang belum tersusun secara maksimal sehingga menyebabkan pencapaian Maturitas Kelembagaan Pemerintah Kota belum tercapai penilaian kategori sangat tinggi. Oleh sebab itu, masih diperlukan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah yang nilai masing-masing 11 variabelnya masih rendah dan mendorong Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja di 11 variabel tersebut dengan dilengkapi data dukung.
- b. Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, diantaranya kategori skala dampak risiko masih bersifat terlalu subyektif, belum menggambarkan kategori yang dapat dikuantitatifkan (jelas, dapat diukur, spesifik), serta skala nilai risiko belum menggambarkan strategi dan upaya organisasi dalam merespon risiko secara tepat dan logik model.
- c. tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target nilai SAKIP adalah pohon kinerja belum sepenuhnya mengeksplorasi alternatif solusi atas pemecahan masalah yang relevan yang dibutuhkan dalam pencapaian kinerja, sehingga pada sebagian pohon kinerja teridentifikasi masih terpaku pada perencanaan yang telah ada serta masih ditemukan indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound*) dan cukup untuk menggambarkan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Proses perumusan isu strategis Sekretariat Daerah Kota Surakarta melalui kajian isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *democratic governance* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Surakarta pada tahun 2021 – 2026 tidak bisa dilepaskan dengan

permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional.

Sekretariat Daerah Kota Surakarta dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalumemperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Kriteria yang ditetapkan sebagai pertimbangan pembobotan isu strategis di Setda Kota Surakarta yaitu: (i). Mendukung langsung pencapaian visi misi kepala daerah dalam RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026; (ii) Menjadi kewenangan Sekretariat Daerah; (iii) Mendesak diamanatkan oleh pemerintah/Kementerian/Lembaga atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Secara umum, isu strategis yang dihadapi antara lain :

- a. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi capaian akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik pemerintah daerah.
- b. Meningkatkan pengoptimalan potensi sumber daya dalam mencapai tujuan Perangkat Daerah

Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Surakarta, sebagai berikut :

1. Menyediakan kebijakan teknis daerah, fasilitasi dan koordinasi untuk membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Menyediakan kebijakan teknis daerah, fasilitasi dan koordinasi untuk membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan.
5. Mengawal efektivitas implementasi kebijakan daerah mendukung kondusivitas daerah, peningkatan daya saing kota dan kesejahteraan masyarakat.
6. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan kerjasama antar daerah yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat.

#### 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatoris, maka Renja Sekretariat Daerah juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Kota. Namun demikian pemenuhan usulan-usulan dari pemangku kepentingan tetap harus mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah serta ketersediaan anggaran yang ada.

**Tabel 2. 5 Realisasi Usulan Musrenbangcam & Diskusi Kelompok Terbatas (DKT) Tahun 2023 Pada APBD Tahun Anggaran 2024**

<b>NO</b>	<b>PRIORITAS PERMASALAHAN</b>	<b>POTENSI PEMECAHAN MASALAH</b>	<b>USULAN KEGIATAN (FISIK)</b>	<b>USULAN KEGIATAN (NON FISIK)</b>	<b>VOL</b>	<b>SATUAN</b>	<b>JUMLAH BIAYA (Rp)</b>	<b>PENGUSUL</b>
1	Pemasangan Pilar Batas Wilayah dan Rupa Bumi di 5 Kecamatan	Pembuatan Pilar Batas Wilayah dan Rupa Bumi dilakukan secara bertahap	Penegasaan Batas Wilayah	-	1	paket	33.000.000	Masyarakat Peduli Pelayanan Publik Kota Surakarta
			Penamaan Unsur Rupabumi	-	1	paket	118.130.400	Masyarakat Peduli Pelayanan Publik Kota Surakarta
2	Pemeliharaan Ruang terbuka hijau/taman di lingkungan Balaikota dan pembuatan taman khusus di depan pendapi dan di depan kantor Walikota	Pengadaan dan pemeliharaan taman sudah dilakukan dengan secara rutin dengan	Pemeliharaan taman balaikota		1	paket	35.000.000	Masyarakat Peduli Pelayanan Publik Kota Surakarta
3	Penyelenggaraan dialog interaktif dari Walikota dengan masyarakat	Sudah dilaksanakan kegiatan dialog interaktif bersama Walikota melalui Refleksi 1 tahun		Refleksi tahunan Pimpinan Daerah	1	dokumen	150.000.000	Masyarakat Peduli Pelayanan Publik Kota Surakarta

		kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota						
4	Penyusunan Perwali oleh Bagian Organisasi	Untuk tahun 2024 direncanakan penyusunan Perwali tentang Pakaian Dinas sekaligus untuk mencabut Perwali 15-AB/2011 tentang Pedoman Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.		Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Tata Naskah Dinas	1	dokumen	57.500.000	Masyarakat Peduli Pelayanan Publik Kota Surakarta
5	PMI sudah bersinergi dengan aplikasi Sikepmas milik Bagian Kesra	Aplikasi Sistem Informasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat bertujuan untuk kemudahan pengajuan bantuan sistem digital secara cepat dan tepat.		Evaluasi Pelaksanaan SIPKEMAS	1	dokumen	9.000.000	Palang Merah Indonesia (PMI)

		Program ini menggan deng Forum Kesra yaitu PMI, Lazis Jateng Cab. Solo, Baznas dan PMS						
6	TJSP untuk menanggulan gi kemiskinan Kota Surakarta	Program CSR sudah dilaksana kan untuk menangg ulangi kemiskin an di Kota Surakarta seperti RTLH		1. Fasilitasi dan Koordina si CSR/TJSP			15.000.000	LPPSP Semarang

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH**

#### **3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah**

Sebagaimana tuntutan reformasi birokrasi serta pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mendorong aparatur pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya secara optimal. Berbagai kebijakan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota diharapkan mampu mengakomodir setiap isu-isu yang berkembang, khususnya yang terkait bidang kelembagaan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dengan agenda meningkatkan SDM berkualitas, membangun karakter bangsa, mengurangi kesenjangan infrastruktur, polhukam, layanan publik dan lingkungan hidup dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

Prioritas Nasional tahun 2025 berdasarkan Rancangan RPJPN 2025-20245 adalah Tahap Pertama Penguatan Fondasi Transformasi :

1. Transformasi Sosial adalah pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, Pendidikan dan perlindungan social
2. Transformasi Ekonomi adalah hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
3. Transformasi Tata Kelola adalah Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan public, peningkatan integritas partai politik dan pemberdayaan Masyarakat sipil
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia adalah memperkuat supremasi hukum dan stabilitas serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gebtar Kawasan dan ketangguhan diplomasi
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi adalah memperkuat ketahanan social budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

Agar selaras dengan prioritas nasional, Provinsi Jawa Tengah menetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 yaitu :

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugur, dan adaptif secara inklusif dan merata
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif

Prioritas Provinsi Jawa Tengah diselaraskan melalui Tema Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2025 yaitu PENGUATAN JEJARING SOSIAL UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT YANG ADAPTIF, PRODUKTIF, KREATIF DAN WELAS ASIH

Peran Sekretariat Daerah Kota Surakarta dalam mendukung Tema Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2025 pada Prioritas Keempat yaitu AKSELERASI PEMBANGUNAN BIROKRASI YANG BERSIH, BERDAYA SAING DAN EFEKTIF MENDORONG KINERJA PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN PUBLIK.

**Tabel 3. 1 Sinkronisasi Prioritas Nasional dan Kota dengan Prioritas Renja Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2025**

Prioritas Nasional/Provinsi/Kota	Prioritas Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025
Prioritas Nasional	
1. Transformasi Ekonomi adalah hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja	1. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 2. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
2. Transformasi Tata Kelola adalah Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan public, peningkatan integritas partai politik dan pemberdayaan Masyarakat sipil	1. Administrasi Tata Pemerintahan 2. Penataan Organisasi 3. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia adalah memperkuat supremasi hukum dan stabilitas serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gebrar Kawasan dan ketangguhan diplomasi	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	
1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
2. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
3. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi Tata Pemerintahan</li> <li>2. Penataan Organisasi</li> </ol>
Prioritas Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2025	
Akselerasi Pembangunan Birokrasi Yang Bersih, Berdaya Saing Dan Efektif Mendorong Kinerja Pembangunan Dan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi Tata Pemerintahan</li> <li>2. Penataan Organisasi</li> </ol>

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Surakarta

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kota Surakarta telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah dalam kurun waktu tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Birokrasi Yang Responsif, Adaptif, Gesit Dan Kolaboratif”**.

Sasaran Sekretariat Daerah Kota Surakarta merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Penetapan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 merupakan turunan dari Renstra Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 – 2026 dan mengacu pada dokumen RKPD Kota Surakarta. Tujuan dan sasaran rencana jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Surakarta sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kota Surakarta**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif	Mengelola risiko dan potensi sumberdaya Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah	Meningkatkan pengelolaan risiko dan potensi sumber daya dalam mencapai tujuan Perangkat Daerah	Fasilitasi dan koordinasi pengendalian risiko perangkat daerah untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan sesuai tujuan perangkat daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi capaian akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik pemerintah daerah	Fasilitasi dan Koordinasi kerja sama pengembangan ekonomi wilayah regional dengan mengoptimalkan kerjasama antar daerah SUBOSUKAWONOSRATEN
			Fasilitasi dan koordinasi pengendalian pencapaian indikator kinerja akuntabilitas pembangunan daerah

			Fasilitasi dan koordinasi penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi yang matang
--	--	--	---

Sekretariat Daerah Kota Surakarta berusaha menyelaraskan hubungan perencanaan pada skala tingkat nasional, Provinsi Jawa tengah, dan tingkat Kota Surakarta. Program, kegiatan dan Kegiatan Prioritas dalam Renja Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 2 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2025**

No.	Program	Kegiatan
1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
		2 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
		3 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
		4 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
2	PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5 Administrasi Tata Pemerintahan
		6 Fasilitasi Kerjasama Daerah
		7 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		8 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9 Penataan Organisasi
		10 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		11 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi
		12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
		13 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		14 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		15 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		16 Administrasi Umum Perangkat Daerah
		17 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		18 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		19 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Tabel 3. 3 Kegiatan Prioritas  
Sekretariat Daerah Tahun 2025**

**1. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**

Skala Prioritas	Sub Kegiatan	Keluaran		Pagu Indikatif Tahun 2025 (Rp)
		Aktivitas	Volume	
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DED Pembangunan Smart Green Building di Komplek Balaikota Surakarta	12 unit	6.994.000.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Penyusunan Cascading dan IKU/IKI di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta	5 dokumen	550.000.000
3	Fasilitasi Keprotokolan	Pengembangan Inovasi Lokananta	6 dokumen	1.554.011.000,00

**2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

Skala Prioritas	Sub Kegiatan	Keluaran		Pagu Indikatif Tahun 2025 (Rp)
		Aktivitas	Volume	
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan BUMD	5 dokumen	168.251.050,00
2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur	3 dokumen	275.000.000,00
3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Review Percepatan Penggunaan PDN Barang dan Jasa	6 dokumen	382.800.000,00

**3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Skala Prioritas	Sub Kegiatan	Keluaran		Pagu Indikatif Tahun 2025 (Rp)
		Aktivitas	Volume	
1	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pemekaran Kelurahan	12 dokumen	1.151.750.000,00
2	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pembinaan Kerohanian ASN Pemerintah Kota Surakarta	29 dokumen	4.739.225.200
3	Fasilitasi Bantuan Hukum	Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin (BaHuGakin)	6 laporan	1.268.300.000

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pendanaan Sekretariat Daerah Kota Surakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025, merupakan turunan dari Renstra Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 – 2026. Rencana Kerja dan Pendanaan tahunan ini diprioritaskan untuk mendukung implementasi dari visi dan misi kepala daerah terpilih, serta merupakan hasil sinkronisasi dengan mempertimbangkan beberapa sasaran strategis dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi serta isu-isu penting terkait bidang keorganisasian.

Pendanaan kegiatan pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 bersumber dana dari APBD Kota Surakarta. Penyusunan program dan kegiatan tersebut berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah hasil Musrenbang RKPD Tahun 2024, yang telah berproses dari tingkat Diskusi Kelompok Terbatas Sekretariat Daerah, Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan yang mengerucut sampai dengan Musrenbang Kota Surakarta Tahun 2024.

Dalam rencana kerja program dan kegiatan pada tahun anggaran 2025, Sekretariat Daerah Kota Surakarta akan melaksanakan 3 Program yang terdiri dari 19 kegiatan dan 62 sub Kegiatan, sesuai dengan prioritas pembangunan Kota Surakarta Tahun 2024, dengan total anggaran sebesar Rp. **54.663.677.077,00** yang tersebar di 9 Bagian.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 Sekretariat Daerah Kota Surakarta, secara terperinci sebagaimana tersaji pada tabel 4.1 berikut ini :

**Tabel 4. 1 Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2025**

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	
Mengelola risiko dan potensi sumberdaya Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	
	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	
	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Serta Kapasitas Daerah</b>	<b>PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	
<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
		Penataan Administrasi Pemerintahan	
<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
		Fasilitasi Bantuan Hukum	
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			
<b>Penataan Organisasi</b>		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
<b>Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>		Fasilitasi Keprotokolan	
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		

<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Pemeliharaan Mebel
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Pengadaan Mebel
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sedangkan uraian dan rincian rencana kerja yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta anggaran dalam rencana kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud, tersaji pada tabel Rumusan Rencana Program berikut ini :

Tabel 4. 2 Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2025

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Period	Realisasi Capaian RENJA	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					SEKRETARIAT DAERAH						22.902.579.991,00							3.390.000.000,00	
					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						22.902.579.991,00							3.390.000.000,00	
					SEKRETARIAT DAERAH						22.902.579.991,00							3.390.000.000,00	
1	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Maturitas PD dengan level 3	78 %			78 %	22.902.579.991,00						78 %	3.390.000.000,00	
	4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan SKPD	-			100 %	21.974.560.131,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-	-	2.400.000.000,00	
	4	01	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				150 Orang/bulan	21.974.560.131,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPAT ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-	-	2.400.000.000,00	SEKRETARIA DAERAH
	4	01	01	2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	928.019.860,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-	-	990.000.000,00	
	4	01	01	2.11	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	928.019.860,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		990.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
						BAGIAN ORGANISASI					1.820.828.500,00								2.678.500.000,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					1.820.828.500,00								2.678.500.000,00		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH					1.820.828.500,00								2.678.500.000,00		
2	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		-	1.820.828.500,00						-		2.678.500.000,00		
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-		-	1.820.828.500,00				-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-	-	2.678.500.000,00		
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan															
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				4 Dokumen	378.328.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		616.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI		
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana															
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik				3 Laporan	365.206.800,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATAN ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif	-		412.500.000,00	BAGIAN ORGANISASI		



						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				5 Dokumen	491.645.100,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		605.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI	
BAGIAN HUKUM											1.981.908.696,00								2.505.910.000,00	
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					1.981.908.696,00							2.505.910.000,00		
4	01					SEKRETARIAT DAERAH					1.981.908.696,00							2.505.910.000,00		
3	4	01	02			PROGRAM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-		-	1.981.908.696,00						-	2.505.910.000,00		
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-		-	1.981.908.696,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-	-	2.505.910.000,00		
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
						Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				500 Dokumen	380.825.000,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATAN ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		398.090.000,00	BAGIAN HUKUM	
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														

						Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum				20 Kasus	1.080.410.000,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		1.395.130.000,00	BAGIAN HUKUM	
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan															
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi					600 Dokumen	520.673.696,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		712.690.000,00	BAGIAN HUKUM	
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN											396.954.518,00							693.000.000,00		
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										396.954.518,00							693.000.000,00		
4	01	SEKRETARIAT DAERAH										396.954.518,00							693.000.000,00	
4	4	01	03		PROGRAM DAN PEMBANGUNAN	-	-			-	396.954.518,00						-		693.000.000,00	
	4	01	03	2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-			-	396.954.518,00				4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-	-	693.000.000,00		
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan															
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan					1 Dokumen	62.635.000,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATAN ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi	-		83.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	





						BAGIAN TATA PEMERINTAHAN						2.028.512.732,00						3.404.641.123,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.028.512.732,00						3.404.641.123,00		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						2.028.512.732,00						3.404.641.123,00		
6	4	01	02			PROGRAM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-				2.028.512.732,00						3.404.641.123,00		
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	-	-				1.352.973.847,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-	-	2.642.176.500,00	
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				35 Dokumen		888.946.859,00	Kota Surakarta, Semua Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		1.767.176.500,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				13 Dokumen		464.026.988,00	Kota Surakarta, Semua Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		875.000.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-			-	675.538.885,00				-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-	-	762.464.623,00		
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Sama Dalam Negeri				46 Dokumen		504.648.885,00	Kota Surakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		270.217.710,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN		
	4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				16 Dokumen		160.290.000,00	Kota Surakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		332.085.036,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN		
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				2 Laporan		10.600.000,00	Kota Surakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		160.161.877,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN		

						BAGIAN PROTOKOL, KOMUNIKASI DAN ADMINISTRASI PIMPINAN					6.490.848.680,00						17.713.600.000,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					6.490.848.680,00						17.713.600.000,00		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH					6.490.848.680,00						17.713.600.000,00		
7	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			6.490.848.680,00						17.713.600.000,00		
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			122.252.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-	-	220.000.000,00	
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	77.252.000,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATA ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		110.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL, KOMUNIKASI DAN ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala				2 Orang	45.000.000,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATA ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi	-		110.000.000,00	BAGIAN PROTOKOL, KOMUNIKASI DAN ADMINISTRASI



						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				10 Paket	1.517.683.150,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATA ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		8.438.100.000,00	BAGIAN PROTOKOL, KOMUNIKASI DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-		-	3.860.913.530,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-	-	7.724.500.000,00		
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan														
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				6 Laporan	934.370.000,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATA ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		1.709.500.000,00	BAGIAN PROTOKOL, KOMUNIKASI DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				15 Laporan	1.349.143.750,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATA ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		2.656.700.000,00	BAGIAN PROTOKOL, KOMUNIKASI DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														

						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				8 Laporan	1.577.399.780,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		3.358.300.000,00	BAGIAN PROTOKOL, KOMUNIKASI DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA											399.148.749,00							1.024.600.000,00		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											399.148.749,00							1.024.600.000,00		
SEKRETARIAT DAERAH											399.148.749,00							1.024.600.000,00		
8	4	01	03			PROGRAM DAN PEMBANGUNAN	-	-		-	399.148.749,00						-		1.024.600.000,00	
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-		-	399.148.749,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-	-		1.024.600.000,00	
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan dan Jasa				20 Dokumen	148.070.749,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATAN ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		421.100.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														

							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				2 Dokumen	75.000.000,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		156.200.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				1529 Orang	176.078.000,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		447.300.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
BAGIAN UMUM												18.765.803.480,00								34.157.500.000,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										18.765.803.480,00								34.157.500.000,00		
4	01	SEKRETARIAT DAERAH										18.765.803.480,00								34.157.500.000,00	
9	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	18.765.803.480,00							-		34.157.500.000,00	
	4	01	01	2.01	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	163.894.000,00				-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan sumber daya masyarakat yang adaptif, produktif, kreatif, dan welas asih	-	-	320.000.000,00		

4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	148.919.000,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATA ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan sumber daya masyarakat yang adaptif, produktif, kreatif, dan welas asih	-		250.000.000,00	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	14.975.000,00	Kota Surakarta, Semua Semua Kel/Desa	PENDAPATA ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		70.000.000,00	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	15.990.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-	-	170.000.000,00	
4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan				12 Laporan	15.990.000,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATA ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang	-		170.000.000,00	BAGIAN UMUM

						Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik							
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	206.937.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-	-	655.000.000,00		
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATA ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		130.000.000,00	BAGIAN UMUM		
	4	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai															
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	206.937.000,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPAT ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		525.000.000,00	BAGIAN UMUM		

	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	1.688.671.960,00					4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-	-	2.215.000.000,00		
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	99.174.000,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATA ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-				125.000.000,00	BAGIAN UMUM		
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	148.725.700,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATA ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-				185.000.000,00	BAGIAN UMUM		
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	208.637.500,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATA ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-				290.000.000,00	BAGIAN UMUM		

4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1 Dokumen	0,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATA ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-	15.000.000,00	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	1.232.134.760,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATA ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-	1.600.000.000,00	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.316.937.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-	1.050.000.000,00	
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					10 Unit	1.030.413.000,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Pasarkliwon	PENDAPATA ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-	250.000.000,00	BAGIAN UMUM

4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	286.524.000,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATA ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan sumber daya masyarakat yang adaptif, produktif, kreatif, dan welas asih	-		600.000.000,00	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATA ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		200.000.000,00	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	10.390.725.820,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-	-	10.890.000.000,00	
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	33.208.820,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATA ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		80.000.000,00	BAGIAN UMUM

4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 Laporan	3.676.859.000,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATA ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		4.300.000.000,00	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					12 Laporan	156.570.000,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Pasarkliwon	PENDAPATA ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		210.000.000,00	BAGIAN UMUM
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 Laporan	6.524.088.000,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATA ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		6.300.000.000,00	BAGIAN UMUM
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan														
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan														
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan														

	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.982.647.700,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-	-	18.857.500.000,00	
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				115 Unit	1.438.382.700,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATA ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		1.700.000.000,00	BAGIAN UMUM	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya														
	4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel				50 Unit	50.500.000,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATA ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		140.000.000,00	BAGIAN UMUM	
						Jumlah Mebel yang Dipelihara														
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2 Unit	2.799.920.000,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATA ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		16.000.000.000,00	BAGIAN UMUM	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi														

4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					10 Unit	686.845.000,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATAN ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-	1.000.000.000,00	BAGIAN UMUM	
4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Unit	7.000.000,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-	17.500.000,00	BAGIAN UMUM	
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM										694.093.696,00						1.168.948.800,00			
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										694.093.696,00						1.168.948.800,00			
SEKRETARIAT DAERAH										694.093.696,00						1.168.948.800,00			
10	4	01	03		PROGRAM DAN PEMBANGUNAN					-	694.093.696,00						1.168.948.800,00		
	4	01	03	2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					-	372.681.000,00						596.289.600,00		
										-						4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-	-	

4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan dan BLUD				23 Dokumen	168.252.000,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATA ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		269.203.200,00	BAGIAN PEREKONOMIA DAN SUMBER DAYA ALAM
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
						Jumlah Laporan Hasil dan Distribusi Perekonomian				2 Laporan	64.753.000,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATA ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		103.604.800,00	BAGIAN PEREKONOMIA DAN SUMBER DAYA ALAM
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
						Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				6 Dokumen	139.676.000,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATA ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		223.481.600,00	BAGIAN PEREKONOMIA DAN SUMBER DAYA ALAM

	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-			-	321.412.696,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-	-	572.659.200,00	
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Modal, Tenaga Kerja				2 Dokumen	291.624.696,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		524.998.400,00	BAGIAN PEREKONOMIA DAN SUMBER DAYA ALAM	
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				2 Dokumen	29.788.000,00	Kota Surakarta, Pasar Kliwon, Kampungbaru	PENDAPATA ASLI (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik	-		47.660.800,00	BAGIAN PEREKONOMIA DAN SUMBER DAYA ALAM	
	<b>J U M L A H</b>										<b>60.921.384.042,00</b>								<b>74.591.426.423,00</b>	

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2025. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 juga mensinergikan antara prioritas pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pokok-pokok pikiran DPRD Kota Surakarta dan hasil capaian kinerja tahun sebelumnya serta aspirasi masyarakat melalui penyelenggaraan Musrenbangcam dan Diskusi Kelompok Terbatas Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, terlihat bahwa program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Surakarta dilaksanakan sesuai dengan perencanaan penganggaran. Meskipun terlihat dari dokumen Rencana Strategis 2021 - 2026 yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak dijalankan pada program dan kegiatan tahunan, akan tetapi pada hakikatnya perangkat daerah Sekretariat Daerah Kota Surakarta yang terdiri dari 9 (sembilan) bagian berusaha merealisasikan dengan melihat isu-isu yang berkembang setiap tahunnya dan kebijakan pusat yang harus segera ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sekretariat Daerah Kota Surakarta selalu berupaya melakukan sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.

Demikian Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Surakarta tahun 2025 ini disusun, dan selanjutnya dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD Kota Surakarta tahun 2025.

Surakarta, 12 Agustus 2024

  
**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURAKARTA**  
  
**BUDI MURTONO, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197110101998031010